

PERLAWANAN GERAKAN PEREMPUAN IRAN TERHADAP PEMERINTAH PASCA KEMATIAN MAHSA AMINI

Muliya Hutami¹, Tendency²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstrak

Artikel ini membahas perlawanan gerakan perempuan Iran dalam melawan aturan wajib jilbab (*compulsory hijab*) yang disebabkan atas pengawasan pelaksanaan yang buruk oleh Polisi Moral. Puncaknya pada paska kematian Mahsa Amini ditahun 2022. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan konsep Civil Rights Movement dari Doug McAdam. Hasil penelitian menunjukkan pasca kematian Mahsa Amini, terjadi perlawanan perempuan yang sporadis dan bersifat insidental dari kendaraan informal dari universitas dan gerakan sebelumnya. Universitas menjadi wadah untuk mahasiswa dalam berfikir kritis terhadap kebijakan pemerintah tanpa takut adanya upaya ikut campur dari pihak luar dan gerakan sebelumnya berperan untuk membuka jalan terhadap ide dan nilai-nilai pemahaman keadilan perempuan. Nilai yang disampaikan melalui pemanfaatan media massa memperlihatkan kondisi ketidakadilan perempuan sehingga menimbulkan simpati. Muncullah desakan dari berbagai negara dan organisasi internasional. Terbentuklah solidaritas perempuan Iran yang muncul dari segala lapisan masyarakat baik nasional hingga internasional sehingga terganggunya pemerintah atas berbagai tindakan kolektif gerakan perempuan.

Kata Kunci: Jilbab Wajib, Polisi Moral Iran, Gerakan Hak-Hak Sipil.

Abstract

This article discusses the resistance of the Iranian women's movement against the compulsory hijab rule due to poor implementation and supervision by the Moral Police. It culminated in the aftermath of Mahsa Amini's death in 2022. The results showed that after Mahsa Amini's death, there was sporadic and incidental women's resistance from informal vehicles originating from universities and previous movements. Universities became a forum for students to think critically about government policies without fear of interference from outside parties, and previous movements played a role in paving the way for ideas and values of understanding women's justice. The values conveyed through the use of mass media show the condition of women's injustice, which generates sympathy. There was pressure from various countries and international organizations. The solidarity of Iranian women that emerged from all levels of society, both national and international, disrupted the government's collective actions of the women's movement.

Keywords: *Compulsory Hijab, Iran Gasht-e Ershad, Civil Rights Movement.*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, terjadi aksi gelombang protes besar di Iran yang disebabkan oleh kematian Mahsa Amini. Amini diduga mendapatkan penganiayaan dari salah satu petugas Polisi Moralitas dengan tuduhan pelanggaran aturan wajib jilbab (*compulsory hijab*) (Davidson, 2023). Kontroversi besar dalam masyarakat terjadi karena terdapat penjelasan berbeda terkait dengan kematian Amini. Pemerintah dianggap tidak transparan dalam menjelaskan kronologi kematian dan terkesan berusaha melindungi pelaku, yaitu beberapa oknum Polisi Moral. Hal ini menimbulkan kemarahan dari seluruh kalangan masyarakat, dan memicu gelombang protes besar untuk menuntut

perubahan dan keadilan yang mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi perempuan dan penghapusan keberadaan Polisi Moral di masyarakat.

Aturan wajib jilbab di masyarakat telah lama menimbulkan kontroversi di masyarakat. Yang menjadi permasalahan utama bukan karena kewajiban penggunaan hijab, melainkan aturan ini memiliki kekuatan hukum yang dalam proses pengawasan pelaksanaannya terdapat penggunaan kekerasan oleh Polisi Moral. Polisi Moral (*Gasht-e Ershad*) merupakan aparat penegak hukum syariah dan badan pengawas pelaksanaan peraturan wajib jilbab yang legal yang dibentuk dan beroperasi atas perintah dari Presiden Mahmoud Ahmadinejad di tahun 2006 (Mansoor, 2022). Polisi Moral berada dibawah Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Iran untuk melaksanakan mandat konstitusional dan pasal-pasal KUHP yang berkaitan pada aturan wajib jilbab dan moralitas publik. Jika ditemukannya pelanggaran maka para pelanggar akan diberikan peringatan lisan atau ditangkap untuk menerima hukuman berupa denda hingga penjara.

Namun pembentukan Polisi Moral di masyarakat justru menimbulkan ketakutan bagi perempuan karena dalam proses pengawasan mereka seringkali mendapatkan perilaku kasar dari aparat, seperti penangkapan sewenang-wenang, pemaksaan terhadap pengakuan perbuatan dan penandatanganan surat pernyataan, ancaman terhadap keluarga, hinaan dan kekerasan verbal lainnya hingga kekerasan fisik di tempat (Begum, 2022). Perempuan yang ditangkap dan disiplinkan seringkali tidak mengetahui kesalahan mereka karena tidak ada rincian atau pedoman yang jelas terkait dengan cara berpakaian yang sesuai dengan peraturan tersebut (Ghaedi, 2022). Perlakuan buruk dari Polisi Moralitas menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan perempuan terhadap pemerintah. Hal tersebut memicu protes-protes oleh korban ataupun keluarga korban, dan beberapa aktivis perempuan Iran, akan tetapi protes tersebut masih dalam skala kecil, tidak terorganisir dan parsial. Kematian Amini pada tahun 2022 menjadi titik balik dari keinginan dan kesadaran untuk memperjuangkan kebebasan untuk melakukan perlawanan dengan aksi protes turun ke jalanan.

Gelombang protes di jalanan ini telah memicu munculnya sebuah gerakan perempuan tanpa pemimpin yang bersifat insidental tetapi berkelanjutan. Dengan tujuan untuk menuntut dilakukannya perubahan terhadap aturan

yang mempertimbangkan nilai-nilai hak perempuan dan penghapusan keberadaan Polisi Moral di masyarakat. Sebenarnya aturan jilbab bukan masalah di masyarakat namun tindakan pemerintah yang tidak transparan terhadap kasus Amini menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap aturan ini sehingga memicu perempuan untuk meminta penghapusan terhadap aturan jilbab yang menjadi akar masalah dan bentuk penyelesaian terhadap permasalahan ini. Sehingga alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana perlawanan gerakan perempuan Iran dalam melawan aturan wajib jilbab oleh pemerintah pasca kematian Mahsa Amini tahun 2022. Dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari perlawanan gerakan perempuan Iran dalam melawan peraturan wajib jilbab di Iran pasca kematian Mahsa Amini.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berfokus pada mendeskripsikan perlawanan gerakan perempuan Iran yang terjadi di dalam negeri dengan tujuan untuk menuntut penghapusan keberadaan Polisi Moral dengan menuntut perubahan terhadap aturan wajib jilbab yang menjadi akar permasalahan gerakan ini kepada pemerintah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang telah tersedia pada jurnal, website resmi Iran, dan informasi berita yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data kualitatif.

Dalam membantu penulis menguraikan permasalahan yang diteliti, penulis mengaplikasikan konsep *Civil Rights Movement* (CRM) atau gerakan hak-hak sipil ke dalam isu gerakan perempuan Iran yang terjadi pasca kematian Mahsa Amini. Para pakar gerakan sosial menyadari peran gerakan hak-hak sipil sebagai katalisator di balik kemunculan gelombang gerakan sosial yang terjadi (Morris, 1999). Gerakan ini menjadi wadah model sarana dan prasarana meledaknya gerakan sosial. Dengan fokus kepada pengupayaan perubahan melalui tindakan kolektif tanpa kekerasan dan tujuan identitas yang fokus mengarah pada suatu isu kelompok. Kemunculan *civil rights movement* berasal dari kelompok yang merasa tertindas dan relatif tidak berdaya yang

menginginkan perubahan sosial melalui pemanfaatan protes sosial. Berikut penjelasan elemen, yaitu (Morris, 1999):

1. Memperluas Peluang Politik, kondisi suatu kelompok challenger yang dihadapkan oleh hambatan atau tantangan dalam proses mencapai tujuan kepentingan dari *one set of state actors* sehingga dalam mencapainya diperlukan pemanfaatan terhadap perubahan sosial yang meluas.
2. Struktur Mobilisasi, suatu perubahan dalam sistem politik yang merupakan hasil dari mobilisasi struktur yang digunakan oleh kelompok untuk mengorganisir dan menyampaikan tuntutan mereka. Dalam hal ini, mobilisasi mengarah pada kendaraan kolektif baik formal maupun informal yang digunakan individu atau kelompok *challenger* dengan tujuan sama, yaitu memobilisasi dan terlibat dalam aksi kolektif.
3. Proses Pembingkai atau Proses Interpretatif Lainnya, telah terjadi kombinasi antara peluang politik dan struktur mobilisasi yang mana antara peluang, organisasi, dan tindakan dimaknai secara bersama-sama.

3. Perlawanan Gerakan Perempuan Iran Terhadap Pemerintah Pasca Kematian Mahsa Amini

Aturan Wajib Jilbab (*Compulsory Hijab*) Di Iran

Aturan wajib jilbab (*Compulsory hijab*) merupakan aturan yang mewajibkan kepada seluruh perempuan Iran untuk menggunakan jilbab ketika hendak keluar rumah, tempat umum, dan tempat bekerja (Asgari, 2022). Aturan ini dilaksanakan dengan penggunaan cadar hitam panjang yang menutupi seluruh bagian tubuh dan jilbab atau selendang yang menutupi seluruh rambut dan menggunakan pakaian yang sopan, longgar, dan menutupi tubuh dan tidak memperlihatkan dada mereka (Foroutan, 2017). Aturan ini diatur di dalam Islamic Penal Code di Iran pasal 638 KUHP Islam bagian 18, yang tertulis "Barangsiapa yang dengan terang-terangan melanggar aturan agama di depan umum, selain dihukum karena perbuatannya, juga harus menerima hukuman 10 hari hingga 60 hari atau harus dicambuk (74 kali cambukan) dengan catatan kepada perempuan yang tanpa menggunakan jilbab yang sesuai maka harus dipenjara selama jumlah hari yang tertera di atas atau membayar denda 50.000 Ryal sampai 500.000 Ryal (Davar, 2023).

Disahkannya aturan wajib jilbab di Iran, tidak lepas dari peran Khomeini selaku penggagas ide aturan wajib jilbab pertama. Dengan memanfaatkan bentuk pemerintahan *Wilayat al-Faqih*, menjadikan semua keputusan penting negara tunduk pada persetujuan pemimpin ulama tertinggi, yaitu seorang *Faqih*. Sistem ini bersifat absolut dan kekuasaannya mencakup hampir semua lembaga negara. Hal ini membuat Khomeini selaku *Faqih* memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mempengaruhi setiap keputusan dan kebijakan atas dasar negara, termasuk menyetujui pemberlakuan aturan wajib jilbab di Iran. Pasca pemberlakuan Aturan wajib jilbab, tidak ada aksi protes yang dilakukan oleh perempuan karena siapa saja yang berani melawan dianggap sebagai pembangkangan terhadap perintah Tuhan sehingga akan segera ditangkap oleh Komite Revolusi Islam untuk mendapatkan hukuman. Hal ini membuat perempuan lebih memilih diam dan menurut.

Pasca pemerintahan Khomeini, terdapat respons berbeda di masyarakat sebab aturan wajib jilbab di Iran bergantung pada siapa pemimpin presiden yang menjabat, sehingga mereka harus mengikuti aturan dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh presiden mereka pada saat itu (Wijayanto dan Ulinnuha, 2022). Pada masa pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), ia mengesahkan Polisi Moral untuk menjadi lembaga resmi pengawasan pelaksanaan aturan wajib jilbab di Iran dibawah Komando Penegakan Hukum (Law Enforcement Command) yang merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran (Detrick, 2017). Polisi Moral akan berpatroli di jalanan umum untuk menegur hingga menangkap perempuan dan laki-laki yang dianggap melanggar aturan berpakaian. Pengawasan menyasar pada para pelanggar norma dan tata cara berpakaian Islam, seperti penggunaan cat kuku, riasan, pakaian terbuka, jilbab yang tidak pantas, perilaku pelecehan dan lain-lainnya.

Aturan wajib jilbab berlanjut pada masa Presiden selanjutnya, Presiden Hassan Rouhani (2013-2021) dikenal sebagai seorang yang beraliran moderat sehingga aturan-aturan syariah yang ada mulai perlahan dilonggarkan ia melakukan banyak kritik terhadap pelaksanaan pengawasan Polisi Moralitas yang melakukan kekerasan terhadap perempuan sehingga selama kepemimpinannya keberadaan Polisi Moralitas tidak lagi terlihat di kota-kota

wilayah Iran. Selain itu, ia juga mengeluarkan kebijakan yang lebih toleran terhadap para pelanggar aturan jilbab di tahun 2017. Para pelanggar aturan berpakaian Islami dan dianggap lalai tidak akan langsung dibawa ke pusat penahanan atau diproses secara hukum tetapi mereka akan diberi keringanan untuk mengikuti kelas pembekalan konseling tentang pengetahuan ajaran Islam terkhusus pada penggunaan jilbab yang benar (Zaheer et al, 2022). Adanya kelonggaran terhadap aturan jilbab menjadi kesempatan bagi perempuan untuk lebih berani menyuarkan kebebasan perempuan dengan melakukan aksi penolakan jilbab, seperti: Gerakan *My Stealthy Freedom* (2014-sekarang), *White Wednesday* (2017), *Girls of Revolution Street* (2017-2018) yang keseluruhannya diprakarsai oleh Masih Alinejad.

Namun Dari seluruh aksi tersebut, gerakan perempuan yang diprakarsai oleh Alinejad masih belum mampu memobilisasi massa karena kurang masifnya gerakan ini dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat. Terdapat banyak alasan mengapa aksi ini dianggap gagal, yaitu pertama kurang masifnya gerakan sebab melalui media online dan hanya sedikit massa yang turun ke jalanan dan masih kuat pemikiran bahwa aksi protes merupakan bagian dari tindakan yang “tidak bermoral” dan “tidak bermatabat” yang mana berlawanan dengan ajaran agama Islam. Kedua, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap hukuman yang akan mereka terima jika mereka mendukung setiap aksi penolakan aturan jilbab.

Masuk pada masa pemerintahan selanjutnya, Presiden Ebrahim Raisi (2021-2024) dikenal sebagai seorang pemimpin yang berusaha kembali menegakkan nilai-nilai Islam yang lebih ketat. Sehingga ia berusaha meningkatkan aktivitas patroli Polisi Moral di jalanan Iran yang berdampak pada meninggalnya perempuan bernama Mahsa Amini. Kematian Mahsa Amini telah menimbulkan kemarahan dan protes besar dari masyarakat terhadap pemerintah Iran. Tetapi Presiden Raisi malah justru melibatkan Polisi Moral dalam tindakan keras terhadap para demonstran pada aksi protes di tahun 2022 pasca meninggalnya Mahsa Amini (Ziabari, 2022).

Perlawanan Gerakan Perempuan Dalam Melawan Aturan Wajib Jilbab Oleh Pemerintah Pasca Kematian Mahsa Amini Dalam Konsep Civil Rights Movement (CRM)

Terbentuknya gelombang protes masif yang dilakukan oleh gerakan perempuan di tahun 2022, tidak lepas dari berbagai bentuk katalisator yang telah terbentuk sejak lama yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Menurut Doug McAdam untuk melihat katalisator ini perlu melihatnya dari awal sejarah terbentuknya aturan wajib jilbab dan kondisi sosial-masyarakat (McAdam, 1998). Yang mana, dendam dan keinginan kuat untuk kebebasan perempuan telah terbentuk sangat lama sehingga puncaknya terjadi pada sebuah peristiwa kematian Amini yang disebabkan oleh ketatnya pelaksanaan aturan jilbab itu sendiri. Sehingga memantik munculnya sebuah gerakan perempuan yang tidak menginginkan adanya korban jiwa seperti Amini.

Menurut Doug McAdam katalisator ini dapat dilihat melalui elemen dari Civil Rights Movement (CRM) yang terdiri dari tiga elemen, yaitu (McAdam, 2000):

a. Memperluas Peluang Politik

Gelombang protes penolakan jilbab di Iran yang terjadi di tahun 2022, menarik perhatian negara-negara dan organisasi internasional sebab aturan jilbab yang menjadi penyebab kematian Amini, telah sejak lama mendiskriminasi kebebasan individu perempuan dan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam meredakan aksi demonstrasi sehingga menimbulkan banyaknya korban luka-luka hingga meninggal. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Iran telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga membuat negara dan organisasi internasional mulai memberikan respon.

Pada tanggal 17 September 2022, Amerika Serikat (AS) dan Perancis turut prihatin atas kematian Amini saat berada dalam tahanan polisi Moral Iran dan meminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah Iran atas pelanggaran tersebut sehingga mengharapkan investigasi yang transparan (Peace, 2022). Adanya respon dari negara lain menjadi peluang bagi gerakan ini untuk dapat memperluas aksi mereka dan menjadi penyemangat perempuan untuk kembali

melakukan aksi gerakan yang lebih masif lagi. Pada hari yang sama terjadi aksi kembali, terjadi di pemakaman Amini di kota Saqqez, Provinsi Kurdistan. Aksi kali ini disertai aksi pelepasan jilbab dan pemotongan rambut yang mereka lakukan di depan pasukan keamanan. Aksi mereka mendapatkan respons pemukulan dan penangkapan dari aparat keamanan Iran (Renny et al, 2022).

Meluasnya protes yang dilakukan oleh gerakan ini membuat pemerintah Iran pada tanggal 21 September 2022, mematikan akses internet dan penutupan banyak aplikasi, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Tiktok*, *Youtube*, dan *Facebook* di seluruh Iran yang bertujuan untuk membatasi pengorganisasian protes dan kontrol narasi kematian Amini (Indonesia, 2022). Pembatasan internet ini kembali menimbulkan kecaman keras dari negara-negara internasional, seperti Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan negara lainnya yang menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara Iran sehingga mendesak pemerintah Iran untuk melakukan pemberhentian kekerasan dan pembatasan terhadap pengunjuk rasa.

Desakan dan kecaman yang muncul dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk menuntut transparansi atas kematian Amini, penghentian penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, dan kebebasan perempuan. Membuat pemerintah Iran mengeluarkan pernyataan pers yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Iran, Ebrahim Raisi di tanggal 28 September 2022 bahwa negara Iran tidak akan membiarkan para pengganggu kedamaian masyarakat melalui kerusuhan (Hafezi, 2022). Pernyataan kedua disusul oleh Ayatullah Ali Khamenei (pemimpin tertinggi) yang disampaikan di tanggal 3 Oktober 2022 bahwa aksi kerusuhan yang terjadi merupakan provokasi dari Amerika Serikat dan Israel sebagai musuh-musuh Iran dan akan terus memberikan dukungan kepada pasukan keamanan untuk menangkap para perusuh yang berasal dari musuh-musuh Iran (Reuters, 2022).

Pasca pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah Iran kembali menuai banyaknya kritik dan kecaman sehingga membuat negara luar mulai memberikan sanksi kepada pemerintah Iran. Sanksi diberikan oleh negara Amerika Serikat, bersama Inggris, Kanada, Australia, dan sekutu serta mitra internasional lainnya kepada polisi Moral, *The Islamic Revolutionary Guard*

Corps (IRGC), *The Law Enforcement Forces* (LEF), Kepala Organisasi Penjara Iran, dan tiga perusahaan media berita (Fars News, Tasnim News dan Press TV). Sanksi ini dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS ialah pemblokiran seluruh properti milik individu dan entitas kepentingan terkait yang berada di AS atau kendali warga negara AS (Treasury, 2023). Selain itu sanksi lain juga datang dari United Nations yang memutuskan untuk mengeluarkan Iran dari *United Nation Commission on the Status of Women* (UNCSW) dikarenakan Iran dianggap tidak mampu melakukan misi kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan adanya pelaksanaan hukum yang mendiskriminasi kehidupan perempuan (Moshtaghian, 2022). Yang mana, hal ini menimbulkan respon pernyataan resmi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, dengan tegas menimbulkan penolakan dan kritik tajam terhadap keputusan PBB (Nations, 2022).

b. Struktur Mobilisasi Yang Ada

Dalam memobilisasi perlawanan terhadap aturan jilbab, gerakan perempuan menggunakan kendaraan informal, yang berasal dari dua kelompok, yaitu pertama, penggunaan platform media sosial yang berasal dari gerakan sebelumnya. Platform media sosial menjadi instrumen paling penting dan utama yang digunakan oleh gerakan perempuan dalam penyebaran informasi dan tempat untuk memunculkan atau mengajak protes aturan jilbab. Mengingat bahwa sebelum terjadinya protes besar di tahun 2022, ada gerakan *My Stealthy Freedom* (MSF) di tahun 2014 yang bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap aturan jilbab. Gerakan ini memanfaatkan platform media sosial Facebook untuk menjadi wadah kampanye dan di tahun 2022 telah memiliki 1 juta lebih pengikut. Mereka menyebarkan berita terkait peristiwa kematian Amini, menyampaikan pandangan mereka terkait jilbab dan menginformasikan terkait aksi-aksi protes perlawanan terhadap aturan wajib jilbab di platform tersebut. Karena telah memiliki banyak pengikut dengan cepat mendapatkan perhatian dan menjadi topik perbincangan utama di masyarakat nasional hingga internasional.

Kedua, aksi kolektif kelompok mahasiswa/i di universitas yang nantinya akan berkembang dan mempengaruhi berbagai kalangan masyarakat dalam

mendukung dan menyuarakan kebebasan berekspresi perempuan di Iran. Universitas menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk dapat mendiskusikan secara bebas isu-isu sosial dari berbagai perspektif, dan wadah mengadakan kolaborasi untuk bekerja sama menyusun strategi yang paling aman. Kelompok mahasiswa melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga menyebarkan nilai-nilai pemahaman terkait keadilan perempuan tanpa ada intervensi eksternal. Pemerintah Iran dan pemimpin universitas tidak berhak untuk ikut campur dalam aktivitas mahasiswa di dalam universitas karena mereka harus bersikap bijaksana dan memahami bahwa mahasiswa diharuskan untuk berpikir kritis. Hal inilah yang menjadikan universitas sebagai wadah yang kuat dan aman bagi para mahasiswa untuk melakukan pergerakan dalam menyuarakan kebebasan perempuan Iran. Mereka dapat bebas melakukan pertemuan mahasiswa hingga antar mahasiswa universitas lain dalam membicarakan strategi dan upaya yang akan mereka gunakan dalam aksi demonstrasi (Cauce, 2024).

Setelah terjadinya banyak protes besar yang dilakukan oleh perempuan dan masyarakat Iran di seluruh wilayah provinsi Iran. Pada tanggal 4 Desember 2022, pemerintah Iran diwakilkan oleh Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri mengumumkan penutupan Polisi Moral Iran (Motamedi, 2022). Pasca pengumuman ini, ketegangan di sejumlah provinsi Iran mulai mengalami penurunan. Banyak perempuan Iran yang mulai beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan jilbab. Walaupun masih ada saja tindakan buruk dari aparat keamanan untuk menangkap perempuan yang tidak berjilbab tetapi hal ini bukanlah masalah. Karena pada kondisi ini, masyarakat bersama-sama melindungi para perempuan agar tidak ditangkap. Hal ini membuat pasukan keamanan lebih memilih diam dan mengabaikan perempuan tersebut agar tidak memunculkan aksi massa.

c. Proses Pembingkaian Atau Proses Interpretatif Lainnya

Instrumen media sosial menjadi alat yang paling mudah dan cepat untuk diakses oleh seluruh orang baik itu dalam negeri hingga di luar negeri. Tidak adanya pembatasan dalam hal akses menciptakan ruang diskusi dan informasi yang sangat bebas tanpa batas. Masyarakat dapat mengekspresikan dirinya, mengutarakan dan menuntut suara, mengomentari hingga menentang

pemerintah (ASA, 2022). Hal ini menjadi peluang yang digunakan oleh gerakan perempuan dalam menciptakan rasa solidaritas, urgensi, dan satu identitas yang sama di dalam sebuah gerakan perlawanan (Çalhan, 2023). Dengan penggunaan tagar (*hashtag*) dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mengingat dan mengetahui identitas gerakan perempuan. Tagar seperti #Mahsa_Amini, #WomanLifeFreedom, #IranProtests, dan lain sebagainya. Tagar berperan aktif sebagai alat untuk menyebarluaskan berita tentang peristiwa penangkapan hingga kematian Amini dan memicu cepatnya perkembangan serta fokusnya suatu isu yang dibahas. Tagar dapat menjadi simbol persatuan dan solidaritas dari gerakan perempuan Iran bersama pendukungnya.

Tabel 1. Proses Pembingkai dan Perkembangan Penafsiran Isu Di Media Sosial (Tweet telah di terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia)

Respon	Tweet
Respon 1 Masyarakat menanggapi informasi kematian Mahsa Amini yang disebabkan oleh kekerasan yang ia terima dikarenakan melanggar aturan jilbab (diambil pada tanggal 16 September 2022).	- Seorang gadis Iran berusia 22 tahun yang terbunuh karena kewajiban menggunakan jilbab #MahsaAmini - Saya tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada Mahsa Amini! #mahsaamini - Mahsa Amini adalah seorang gadis perempuan Iran yang berusia 22 tahun dibunuh oleh patroli pengawas (polisi moral). Tolong sampaikan suara rakyat Iran ke seluruh dunia #Mahsa_Amini #MahsaAmini
Respon 2 Masyarakat mulai tertekan akan tekanan dan diskriminasi dari aturan jilbab. Proses terbaginya emosi kepada para pembaca Tweet dan komentar karena mereka mulai memperhatikan dan menilai tentang kisah yang serupa dengan kisah hidup mereka (persamaan pendapat dan pandangan). Membuat para perempuan Iran mulai menyadari bahwa tekanan dan diskriminasi atas kebebasan telah mencapai puncak mereka (diambil pada tanggal 17-18 September 2022).	- Sampai kapan penindasan ini akan berlangsung ? - Aku bersumpah demi diriku sendiri dan demi tangisan ini dan permohonan kehormatan kita. Kami akan menjatuhkan hukuman atas ketidakadilan ini kepada Anda satu per satu. #Oplran Mahsa_Amini - Luka-luka ini tidak dapat disembuhkan. Dan tidak pernah. Tidak pernah, kami tidak akan lupa. Kami tidak memaafkan. #Mahsa_Amini - Aku bersumpah demi air mata yang kita teteskan. Aku bersumpah demi darah yang kau tumpahkan. Ketidakadilan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. #Mahsa_Amini
Respon 3 Respon seruan dan dukungan untuk kebebasan perempuan Iran. Para perempuan telah menyamakan suara mereka yang akan menjadi identitas dari gerakan mereka. rasa amarah atas ketidakadilan yang dirasakan menggerakkan mereka pada sebuah harapan bahwa dibutuhkannya aksi kolektif sebagai perjuangan mereka. Para perempuan telah menyamakan suara mereka yang akan	- Wanita, Kehidupan, Kebebasan. Pria patriotik. #Mahsa_Amini - Saya rela mati demi mereka. Saya menjadi marah. Wanita kehidupan kebebasan. #Mahsa_Amini - Mahsa Amini, 22, koma setelah disiksa oleh otoritas Iran. ini tidak dapat diterima apa pun yang terjadi, tetapi fakta bahwa dia ditangkap karena mengenakan jilbab yang tidak pantas membuatnya menjadi lebih mengerikan.

menjadi identitas dari gerakan mereka dan datangnya dukungan dari berbagai kalangan terkhusus dari kalangan laki laki (diambil pada tanggal 18-19 September 2022).	Silakan bergabung dengan saya untuk membagikan nama dan kisahnya. #Mahsa_Amini
Respon 4 Respon aksi kepada gerakan perempuan (diambil pada tanggal 20-28 September 2022).	-Kamu tidak sendirian. Kami melihat dan mendengarkanmu. Perempuan itu membutuhkan perlindungan dan kebebasan. InsyaAllah para pembunuh itu akan membayar. Beristirahatlah dalam damai Mahsa. - Saya tahu kita semua lelah. Berada di jalanan, ketakutan dan stres dengan berbau mesiu dan air mata. Secara pribadi, saya tidak akan mundur sampai akhir, tetapi saya tidak tahu seperti apa akhirnya. Ini tahun yang buruk, ini adalah ujian bagi kami, kami tidak gagal. #Mahsa_Amini - Jika Anda mendapatkan internet dan membaca Tweet ini, maka jadikanlah viral. #Mahsa_Amini - Kami sedang berjuang. #Mahsa_Amini

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan *tweet* dan komentar ditabel atas, pada proses 1 hingga proses 4 terjadi perkembangan penafsiran suatu isu yang memicu terjadinya respons tegas dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini terhadap aturan wajib jilbab. Ia menekankan bahwa jilbab telah menjadi simbol identitas Republik Islam dalam melawan pengaruh Barat sehingga menolak untuk menghapus aturan wajib jilbab di Iran. Ia mendorong untuk diaktifkannya kembali Polisi Moral di masyarakat pada tanggal 16 Juli 2023 yang kemudian disusul dengan disahkannya RUU 'Hijab dan Kesucian' di tanggal 20 September 2023. RUU tersebut terdiri dari 71 pasal salah satunya mengarah pada peningkatan hukuman perluasan kewenangan pasukan keamanan Iran (Watch, 2024).

Walaupun telah disahkannya RUU 'Jilbab dan Kesucian' yang menjadi pertanda bahwa gerakan perempuan telah mengalami kegagalan tetapi gerakan ini telah berhasil menciptakan solidaritas perempuan Iran dari segala lapisan masyarakat baik itu dari nasional hingga internasional. Selain itu, terganggunya pemerintah atas aksi kolektif yang berasal dari tiga katalisator oleh Doug McAdam telah memicu terganggunya pemerintah Iran. Kondisi tersebut menjadi pertanda bahwa gerakan perempuan masih harus terus berlanjut dan berjuang dalam mencapai tujuan mereka untuk dapat melakukan perubahan terhadap

aturan jilbab di Iran dan sekaligus menghapus keberadaan Polisi Moral di masyarakat

4. Kesimpulan

Dalam melakukan perlawanan terhadap aturan wajib jilbab (*compulsory hijab*) di Iran, terdapat katalisator-katalisator yang digunakan oleh gerakan perempuan, yaitu: pertama, memperluas peluang politik dari desakan negara dan organisasi internasional untuk memberhentikan aksi demonstrasi dan memenuhi tuntutan dari gerakan perempuan. Selain itu, dengan memberikan sanksi-sanksi kepada aparat pemerintah Iran dan Kepolisian Moral Iran. Kedua, Struktur mobilisasi yang ada berupa memobilisasi massa dengan memanfaatkan kendaraan informal yang telah ada sejak lama, yang dalam hal ini ialah gerakan *My Stealthy Freedom* oleh aktivis Masih Alinejad, dan Universitas oleh para mahasiswa. Terakhir, pembingkai atau proses interpretative lainnya, menciptakan satu identitas dan urgensi yang sama melalui penggunaan media sosial dengan menggunakan tagar #Mahsa_Amini yang dipengaruhi oleh para aktor-aktor figur terkenal.

Dari ketiga katalisator yang diupayakan oleh gerakan perempuan, menimbulkan respon penolakan oleh *Faqih* Ayatullah Ali Khomeini karena aturan jilbab telah menjadi identitas dari Republik Islam Iran sehingga mendorong kembali aktifnya Polisi Moral dan pengesahan RUU 'Hijab dan Kesucian' terbaru. Hal ini menjadi sinyal bahwa gerakan perempuan akan terus berlanjut di Iran. Solidaritas perempuan Iran yang muncul dari segala lapisan masyarakat baik itu dari nasional hingga internasional dan terganggunya pemerintah atas berbagai tindakan kolektif gerakan perempuan telah menjadi potensi dan peluang besar terciptanya perubahan sosial yang mereka cita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASA, A. N. (2022). Yeni Toplumsal Hareketlerde Sosyal Medyanın Rolü. / *Journal of SDU IFADE*, 40-63.
- Asgari, A. (2022). *Compulsory Hijab in Iran Women's Choice Or a State's Demand?* Swedia: University College Stockholm.

- Begum, R. (2022, November 16). *Iranian Women's Demands for Freedom Must Be Heard*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2022/11/16/iranian-womens-demands-freedom-must-be-heard>
- Çalhan, M. (2023). Amini Protests: Vowing for a New Commitment Between Society and State. *The Journal of Iranian Studies*, 101-125.
- Cauce, A. M. (2024, March 12). *ELSEVIER*. Diambil kembali dari The role of universities in catalyzing social change: <https://www.elsevier.com/connect/the-role-of-universities-in-catalyzing-social-change>
- Clayton, D. M. (2018). Black Lives Matter and the Civil Rights Movement: A Comparative Analysis of Two Social Movements in the United States. *Journal of Black Studies*, 1-33.
- Davar, F. (2023, April 18). *A Close Look at Iran's Gruesome Hijab Laws*. Diambil kembali dari IRANWIRE: <https://iranwire.com/en/women/115651-a-close-look-at-irans-gruesome-hijab-laws/?ref=americanpurpose.com>
- Davidson, C. (2023, June 28). *Iranian Journalists Niloofar Hamed and Elaheh Mohammadi Have Been Awarded WAN-IFRA's 2023 Golden Pen of Freedom*. Diambil kembali dari World Association of News Publishers: <https://wan-ifra.org/2023/06/iranian-journalists-niloofar-hamed-and-elaheh-mohammadi-have-been-awarded-wan-ifras-2023-golden-pen-of-freedom/>
- Detrick, A. F. (2017). *Thesis: Virtue And Vice: Morality Police And Social Control In Islamic Regimes*. California: Univesity Of Washington.
- Foroutan, G. (2017). *Visual Explorations In Response To Compulsory Hijab For Iranian Women*. Tehran: Alzahra University.
- Ghaedi, M. (2022, April 12). *Who are Iran's 'Morality Police'?* Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/en/who-are-irans-morality-police/a-63200711>
- Indonesia, C. (2022, September 23). *Iran Blokir Internet, Bagaimana Cara Warga Akses WhatsApp*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220923124930-185-851690/iran-blokir-internet-bagaimana-cara-warga-akses-whatsapp>
- McAdam, D. (1998). *Revisiting the U.S.. Civil Rights Movement: Toward a More Synthetic Understanding of the Origins of Contention*. University of Chicago Press.
- McAdam, D. (2000). *Revisiting the U.S. Civil Rights Movement: Toward a More Synthetic Understanding of the Origins of Contention*. Dalam D. McAdam, *Political Process and the Development of Black Insurgency* (hal. 3-32). Chicago: : University of Chicago Press.

- Morris, A. D. (1999). A Retrospective on the Civil Rights Movement: Political and Intellectual Landmarks. *Annual Review of Sociology*, 517-539.
- Moshtaghian, J. H. (2022, Desember 14). *Iran Expelled From UN Commission On Women*. Diambil kembali dari CNN World: <https://edition.cnn.com/2022/12/14/middleeast/iran-expelled-from-un-womens-rights-body-intl/index.html>
- Motamedi, M. (2022, December 4). *Iran Suspends Morality Police. What Does It Mean ?* Diambil kembali dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/4/iran-suspends-morality-police-what-does-it-mean>
- Nations, U. (2022, December 14). *Iran removed from UN Commission on the Status of Women*. Diambil kembali dari UN News: <https://news.un.org/en/story/2022/12/1131722>
- Renny Ayu Puspitasari, P. P. (2022). Juridical Study of the Death of Mahsa Amini Based on Islamic Law and International Human Rights. *Economics Journal*, 607-612.
- Reuters. (2022, September 29). *Iran President Says Amini's Death is 'Tragic Incident', but 'Chaos' Unacceptable*. Diambil kembali dari Alarabiya News: <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/09/28/Iran-s-Raisi-says-Mahsa-Amini-s-death-has-saddened-everyone->
- Watch, T. H. (2024, October 14). *Iran: New Hijab Law Adds Restrictions and Punishments*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2024/10/14/iran-new-hijab-law-adds-restrictions-and-punishments>
- Wijayanto dan Ulinnuha, (2022). Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab Pada Era Hassan Rouhani. *Musawa*, 171-186.
- Zaheer, S. F. (2022). Mahsa Amini And The Anti-Hijab Protest In Iran: A Post-Trust Analysis. *Regional Studies*, 36-57.
- Ziabari, K. (2022, July 21). *Let's Be Honest, Iran's Hijab Saga Is Not About Religion*. Diambil kembali dari The New Arab: <https://www.newarab.com/opinion/lets-be-honest-irans-hijab-saga-not-about-religion>